

STRATEGI PELAKSANAAN PENYULUHAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar)

Tulus Susanto, Heru Ribawanto, Abdul Wachid

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: tuluspublik@gmail.com

***Abstract:** The Counseling Implementation Strategy for Family Planning Program (Study on Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning Institution of Kabupaten Karanganyar). Along with the legalization of Regional Autonomy Law of 2004, the development on each district has been authorized by the district itself, including one of which is the development of the population. BKKBN as the authorized institution of now decentralized government is facing a really tough challenges. The differing view and opinion in the local government about the population problem, the lack of competent field instructor, and the questioned commitment of stakeholders on this Family Planning program are some of the problems that have been identified and must be solved quickly by BKKBN. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Research results show that The desire can be realized with the strategic commitment of the stakeholders and the executives. The executives should continuously keeping an eye to the strategy so it will be well implemented, A good collaboration and proper administrative coordination between Kabupaten Karanganyar BP3A & KB with other government agencies in the district is needed*

***Keyword:** Implementation Strategy, KB Counseling Program*

Abstrak: Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar). Seiring dengan disahkannya Undang – Undang Otonomi Daerah Tahun 2004, kini pembangunan yang ada di daerah sudah menjadi kewenangan dari daerah itu sendiri termasuk salah satunya adalah pembangunan kependudukan. BKKBN sebagai lembaga yang mengurus permasalahan penduduk kini sudah tidak lagi bersifat sentralistik, namun lebih diserahkan kepada pemerintah daerah (desentralistik). Akibatnya Program KB menghadapi tantangan yang berat. Hal ini disebabkan salah satunya pemerintah di Daerah belum mempunyai pandangan yang sama tentang arti dari kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya komitmen strategik dari jajaran pimpinan dan pelaksana, keinginan itu dapat direalisasikan. Para eksekutif sebaiknya secara terus menerus mengamati apakah strategi itu dilaksanakan dengan baik, kemudian Menjaga Keharmonisan, kerjasama administrasi serta koordinasi yang baik antara BP3A&KB Kabupaten Karanganyar dengan lembaga pemerintah lainnya di kabupaten karanganyar sebaiknya lebih ditingkatkan.

Kata kunci: Strategi Pelaksanaan, Penyuluhan Program KB

Pendahuluan

Penduduk merupakan aset negara yang menjadi titik sentral seluruh kebijakan pemerintah dan program pembangunan nasional. Setiap upaya pemerintah dalam rangka memajukan negara dan bangsa tidak lepas dari upaya untuk membangun kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 2000-2010 lebih tinggi dibanding

periode 1990-2000. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 mencapai 1,49% lebih tinggi dibanding periode 1990-2000 yang hanya mencapai 1,45%. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237,56 juta orang yang terdiri dari 119,51 juta orang laki-laki dan 118,05 juta orang perempuan. Kemudian, menyikapi tantangan global serta menyangkut mengenai kependudukan di Indonesia tersebut, pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut UU PKPK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Kewenangan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) BKKBN pada tahun 2004 tidak lagi bersifat sentralistik, hal ini sebagai salah satu bentuk otonomi daerah. Akibatnya program Keluarga Berencana (KB) menghadapi tantangan luar biasa berat, karena secara kelembagaan di tingkat kabupaten/kota tidak memiliki tingkat kesiapan yang sama. Lebih lanjut jumlah petugas Keluarga Berencana di lapangan semakin berkurang cukup drastis karena petugas Keluarga Berencana meninggalkan pekerjaannya tersebut dan beralih fungsi pada pekerjaan lain, seperti ada yang menjadi Camat, Kepala Desa, menjadi pejabat dan asisten pejabat, sehingga petugas KB yang tersisa saat ini persis anak ayam yang kehilangan induknya (Alimoeso 2009, h.5). Berbagai kondisi di atas apabila tidak segera ditanggulangi dapat menyebabkan dampak yang meluas hingga berpengaruh pada keberhasilan program KB. Program Keluarga Berencana harus terus dipantau karena menjadi program pemerintah secara berkelanjutan untuk mengatur pertumbuhan penduduk agar dapat sejalan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Program pemerintah terutama dalam Program KB agar terus berhasil tentunya butuh dukungan dari berbagai pihak serta strategi.

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai strategi dalam pelaksanaan penyuluhan program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan program Keluarga Berencana di Kabupaten Karanganyar pada khususnya.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Tujuan utama administrasi publik (*public administration*) atau administrasi negara adalah meningkatkan kesejahteraan publik atau masyarakat dalam suatu negara atau suatu daerah. Berdasarkan Konteks Administrasi publik program keluarga berencana adalah termasuk di dalamnya, yaitu peningkatan kesejahteraan publik khususnya dalam pembangunan kependudukan.

2. Pemerintah Daerah

Pengertian dari pemerintah daerah menurut Haris seperti yang dikutip oleh (Nurcholis, 2010, h.26) mendefinisikan bahwa pemerintah daerah (*local self-government*) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional.

3. Otonomi Daerah Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia

Menurut (Widjaja, 2002, h.76) tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dibutuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Mengingat masyarakat merupakan potensi sumber daya manusia dan merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional, maka untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna seperti yang terdapat dalam PP Republik Indonesia No. 27 Tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan penduduk.

4. Strategi

(Thompson dan Strickland dalam Salusu, 1996, h.436) mengungkapkan bahwa Kunci sukses implementasi strategi adalah menyatukan organisasi secara total untuk mendukung strategi dan melihat apakah setiap tugas administratif dan aktivitas dilakukan menurut cara yang memadukan secara tepat semua persyaratan sehingga pelaksanaan dari strategi itu dapat dinikmati. Pernyataan ini mengandung tuntutan akan perlunya komitmen. Maka hanya dengan komitmen strategik dari jajaran pimpinan dan pelaksana, keinginan itu dapat direalisasikan. Para eksekutif harus secara terus menerus mengamati apakah strategi itu dilaksanakan dengan baik. Tanpa komitmen dari manajemen puncak dan terutama semua eselon atas, kecil kemungkinan pelaksanaan strategi akan memberikan hasil yang gemilang.

5. Penyuluhan

Penyuluhan seringkali dibedakan dari penerangan, walaupun keduanya merupakan upaya edukatif. Dari proses komunikasi ini ingin diciptakan masyarakat yang mempunyai sikap mental dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pelaksanaan penyuluhan adalah untuk menjamin bahwa Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang akan bertindak sebagai penyuluh Keluarga Berencana dapat melaksanakan tugasnya, maka

mereka harus berlatih terlebih dahulu dengan mencoba atau melakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan yang akan didemonstrasikan kepada masyarakat.

6. Program Keluarga Berencana

Program KB adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan pertumbuhan penduduk secara bertahap dengan mengendalikan fertilitas PUS baik dengan mengatur jarak kelahiran anak, mencegah kehamilan bagi yang menderita sakit dan menyetop kelahiran bagi yang sudah mempunyai dua atau tiga anak. Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Program KB mempunyai empat dimensi, yakni : pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian terhadap fenomena tertentu yang diperoleh dari subyek berupa kelompok atau perspektif lain. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Menurut (Spradley dalam Sugiono, 2011, h.208) menyatakan bahwa “ *a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Adapun fokus penelitian ini adalah

1. Strategi pelaksanaan penyuluhan Program Keluarga Berencana oleh Badan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, meliputi:
 - a. Tujuan pelaksanaan penyuluhan program keluarga berencana (KB)
 - Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu dan anak
 - Peningkatan Partisipasi pria dalam keluarga Berencana (KB)
 - b. Sarana dalam penyuluhan program Keluarga Berencana (KB)
 - c. Mekanisme atau cara pelaksanaan penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB)
 - Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
 - Pembinaan peserta KB

- Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan
2. Faktor pendukung dan penghambat Strategi Penyuluhan program keluarga berencana oleh Badan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. Sebagai penjamin bahwa strategi baru itu akan berhasil, diperlukan kebijaksanaan organisasi yang akan menyiapkan semua fasilitas yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah – masalah yang timbul selama implementasi. Untuk itu perlu dideskripsikan dan dianalisis terkait dengan semua faktor-faktor pendukung serta penghambat dari implementasi strategi pelaksanaan penyuluhan teori Salusa. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini dilihat dari segi:
 - a. Faktor Pendukung
 - Kualitas Kepemimpinan
 - Monitoring Program
 - b. Faktor Penghambat
 - Jangka Waktu Pelaksanaan
 - Pelaksanaan Analisis SWOT

Pembahasan

1. Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPA&KB) Kabupaten Karanganyar

Program Keluarga Berencana tidak dapat terlepas dari fungsi penyuluhan. Penyuluhan Keluarga Berencana merupakan kegiatan penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga berkualitas. Sasaran utama pelaksanaan penyuluhan Program keluarga Berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yakni suami istri di mana istri berusia 15-49 tahun karena mempunyai kemungkinan untuk hamil dan memiliki anak. Dengan demikian, PKB harus mampu memberikan informasi kepada mereka agar menjadi tahu, mau dan mampu merencanakan sendiri keluarganya agar berkualitas.

a. Tujuan (ends)

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, program KB mengalami perubahan paradigma. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, program KB tidak lagi dilaksanakan sentralistik di bawah koordinasi BKKBN, melainkan didesentralisasikan kepada

daerah. Jadi, Kabupaten/Kota memiliki kemandirian dalam menangani masalah KB, termasuk urusan anggaran dan personilnya.

Perda Nomor 7 Tahun 2008 Kabupaten Karanganyar telah mengatur didalamnya mengenai Tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar terutama dalam pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yaitu : 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; 2. Advokasi dan komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE); 3. Program Kegiatan Pelayanan KB di Kabupaten Karanganyar, Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan program KB dan KS di Kabupaten Karanganyar, Pelayanan KB di Karanganyar meliputi program pelayanan KB yang dilakukan di tempat – tempat rumah sakit dan petugas medis di Kabupaten Karanganyar. Kemudian Pelayanan peserta KB melalui metode kontrasepsi dan pemberian *Informed Consent* (Persetujuan) dan yang terakhir pelayanan peserta KB keluarga pra S dan KS 1.

b. Sarana (*Means*)

Peningkatan sarana dalam kegiatan penyuluhan KB merupakan kunci kesuksesan program. Di era otonomi daerah sudah saatnya perlu ditingkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah untuk berinisiatif segera meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan KB. Khususnya dalam hal harmonisasi terhadap masyarakat beserta instansi – instansi terkait yang berpotensi dalam mensukseskan program Keluarga Berencana.

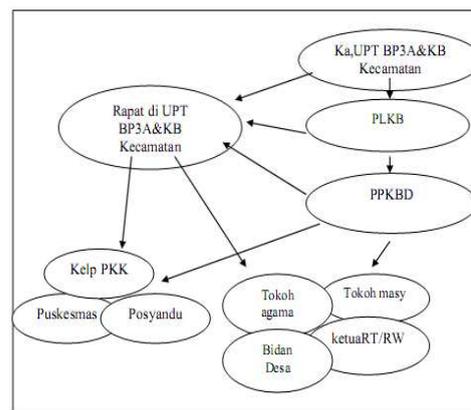
Di Kabupaten Karanganyar sendiri dalam usaha penyuluhan KB mempunyai langkah – langkah antara lain kegiatan operasional yang meliputi Rakor KB tingkat Desa, Rakor KB tingkat Kecamatan, Rakor TOGA/TOMA .

c. Cara (*ways*)

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas tertuang di dalam Bab 29 RPJM 2004-2009 (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005) isinya mengenai antara lain memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Pelaksanaan penyuluhan program KB Badan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Karanganyar harus diupayakan secara intensif dengan melakukan koordinasi berbagai pihak terkait seperti yang telah dijelaskan dalam sarana dalam strategi diatas. Substansi koordinasi mencakup baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasinya. Koordinasi yang paling

intensif dilakukan adalah dengan BKKBN provinsi, khususnya untuk pengadaan alokasi dan pelaksanaan program KB.

Berikut merupakan penerapan strategi sesuai dengan Bab 3 Renstra BKKBN 2010 – 2014 (Perka BKKBN NOMOR: 133/PER/B1/2011): 1. Tujuan strategi meliputi peningkatan kesehatan terutama ibu dan anak, peningkatan pelayanan Keluarga Berencana sebagai upaya dalam keberhasilan penyuluhan, penguatan kelembagaan dan jaringan Keluarga Berencana; 2. Sarana Strategi Meliputi, BKKBN Pusat dan provinsi, rumah sakit dan instansi – instansi terkait lainnya, peran PLKB, PPKBD/Sub PPKBD, TOGA, TOMA, bidan desa, dan puskesmas; 3. Cara dalam strategi meliputi menata kembali koordinasi dari pusat sampai ke tingkat lini lapangan pasca penyerahan kewenangan dan membangun kembali komitmen dengan cara koordinasi dan kerjasama dengan instansi – instansi terkait. Berikut gambar desain strategi pelaksanaan penyuluhan melalui koordinasi antara instansi terkait sampai ke tingkat lini lapangan.



Gambar 1 : Bagan Koordinasi Penguatan Kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten / kota

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan Strategi pelaksanaan penyuluhan program keluarga berencana tidak dapat dipisahkan dengan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. (Alexander dalam Salusa, 1996, h.431) menjelaskan beberapa masalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan strategi yaitu meliputi jangka waktu pelaksanaan, pelaksanaan analisis SWOT, dan kualitas kepemimpinan.

Lebih lanjut akan dijelaskan dengan menggunakan pisau Alexander, dalam Salusa berikut ini:

a. Faktor Pendukung

Kualitas kepemimpinan yang baik dan memadai, pengarahan dari para pimpinan unit kerja yang tepat, semuanya merupakan sumber dalam menyukseskan implementasi strategi. Instruksi - instruksi kepada karyawan eselon bawah sangat dibutuhkan dan bahkan pelatihan yang disyaratkan harus sering dilakukan. Hal tersebut dapat menguatkan posisi karyawan terdepan, mengingat interpretasi terhadap tugas yang harus diemban sering berbeda dari yang sebenarnya. Selain itu, monitoring atas pelaksanaan tugas juga mempunyai peranan yang sangat penting. BP3A&KB Karanganyar sudah melakukan koordinasi baik dengan UPT P3A&KB Tingkat kecamatan di Kabupaten Karanganyar dan termasuk di dalamnya adalah UPT P3A&KB Kecamatan Tasikmadu. Berbagai upaya telah dilakukan meliputi rapat, kegiatan pelayanan bulanan dan kerja sama dengan instansi – instansi di Karanganyar. Namun masih perlu ditingkatkan lagi mengenai koordinasi di lini lapangan, dalam hal ini BP3A&KB Kabupaten Karanganyar selaku lembaga pemerintah dalam urusan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan bertugas melakukan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Karanganyar kemudian Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2008 Kabupaten Karanganyar.

b. Faktor Penghambat

• Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan ternyata jauh lebih lama daripada yang direncanakan karena timbulnya banyak masalah baru yang tidak diantisipasi, tidak diprediksi sebelumnya. Sementara itu, selama kegiatan implementasi berlangsung, koordinasi tidak berjalan secara efektif, apalagi banyak karyawan yang tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk melaksanakan kewajiaban. Upaya pengendalian pertumbuhan dan peningkatan kualitas penduduk, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Tujuan dari Undang – undang tersebut kemudian mengilhami terbentuknya Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selaku badan yang mengurus mengenai program Kependudukan dan Keluarga Berencana berfungsi melaksanakan Jaminan dan Pelayanan KB, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta

Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPPA&KB Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu dalam hal ini adalah UPT PPA&KB berfungsi melanjutkan program sampai lini lapangan, dan sebagai pengkoordinir program KB tingkat kecamatan. Mengingat SDM mempunyai peran besar, khususnya dalam pelayanan KB. Permasalahan di lapangan yang belum terselesaikan adalah keterbatasan jumlah petugas lapangan yang masih kurang ideal bisa menjadi penyebab tidak efektifnya sebuah strategi. Hal ini yang berpotensi mengurangi kinerja pencapaian target dalam program KB.

• Pelaksanaan analisis SWOT

Saat analisis SWOT dilakukan, masalah yang berkaitan dengan faktor eksternal telah banyak dibicarakan. Namun pada saat pelaksanaannya, faktor-faktor itu banyak sekali dilupakan dan kurang terkontrol. Akibatnya adalah aktivitas organisasi kadang-kadang terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal yang tidak terkendali itu sehingga hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan KB, peran pemerintah masih sangat besar dan koordinasi kerja merupakan kunci penggerak kegiatan tersebut. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh antar instansi di daerah. Seiring berjalannya otonomi daerah sudah saatnya perlu ditingkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah untuk berinisiatif segera meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan KB, khususnya dalam hal harmonisasi dengan instansi – instansi terkait mengenai pelaksanaan evaluasi bersama, kesatuan pedoman pelayanan serta dukungan anggaran. Sebagai gambaran dalam ini BP3A&KB Kabupaten Karanganyar dalam hasil wawancara telah bekerjasama dengan dinas kesehatan, BPS, TNI/Polri, rumah sakit swasta, dan berkoordinasi dengan UPT Kecamatan. Namun hal itu masih perlu adanya *updating data* yang mencakup berapa kali terjadi pertemuan, rapat dan pengadaan kerjasama terutama bidang penyuluhan KB. Berbagai upaya yang dilakukan telah menunjukkan dan mempertegas komitmen kerjasama dalam penyuluhan Keluarga Berencana. Tujuan dari berbagai upaya yang dilakukan tidak lain agar pelayanan KB menjadi lebih optimal dan terwujudnya keberhasilan program KB.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pelaksanaan penyuluhan program Keluarga Berencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPA&KB) di Kabupaten Karanganyar dilihat dari tiga aspek, sebagai berikut :

- a. Menentukan tujuan dari strategi pelaksanaan penyuluhan program keluarga berencana di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar kemudian Nomor 7 Tahun 2008. Keberhasilan tujuan dari strategi pelaksanaan penyuluhan dilihat dari hasil – hasil pencapaian pelayanan KB di Kabupaten Karanganyar.
 - b. Menentukan sarana dari strategi pelaksanaan penyuluhan program KB. Sarana merupakan alat dalam mencapai tujuan dari strategi. Strategi pelaksanaan yang meliputi penyuluhan, sarana yang digunakan, fungsi instansi – instansi dari pusat sampai ke tingkat bawah atau lini lapangan, serta peran tokoh masyarakat.
 - c. Menentukan cara di dalam strategi merupakan upaya mencapai tujuan strategi melalui sarana yang ada atau yang telah ditentukan. Strategi pelaksanaan penyuluhan cara yang digunakan adalah melalui koordinasi dengan instansi dari pusat sampai ke lini lapangan, kemudian merangkul instansi terkait sebagai penguatan komitmen dalam keberhasilan program.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pelaksanaan penyuluhan program Keluarga Berencana di Kabupaten Karanganyar adalah :
- a. Faktor pendukung strategi pelaksanaan penyuluhan program Keluarga berencana di Kabupaten Karanganyar, antara lain:
Berdasarkan segi kualitas kepemimpinan BP3A&KB Kabupaten Karanganyar mempunyai komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program. Berbagai upaya seperti menjangkau kemitraan, lalu koordinasi dengan UPT PPA&KB Karanganyar juga telah dilakukan untuk memperkuat komitmen dalam pelaksanaan program KB berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Karanganyar
 - b. Faktor penghambat strategi pelaksanaan penyuluhan program Keluarga berencana di Kabupaten Karanganyar, antara lain:
 - Jangka waktu pelaksanaan masih terlihat belum jelas, mengingat masih ada kendala dalam pelaksanaan terutama dari faktor internal seperti jumlah penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) yang semakin turun. Padahal fungsi PLKB sebagai penggerak dan pengkoordinir program di tingkat lini lapangan.
 - Pelaksanaan analisis SWOT mengenai faktor – faktor eksternal organisasi berjalan kurang maksimal. Mengingat dalam strategi faktor eksternal bisa digunakan sebagai dukungan terhadap program. Dengan kemitraan dan koordinasi yang baik antar instansi, akan menghasilkan SKPD yang lebih berkomitmen dalam mewujudkan keberhasilan program.

Daftar Pustaka

- Nasution, S. (1990) **Pengembangan Kurikulum**. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pemberian Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan Reproduksi**. Karanganyar, BP3A&KB.
- Salusu, (1996) *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* . Bandung, Alfabeta,cv
- Suryono, Agus. (2004) *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang, UM PRESS.
- Widjaja, HAW, (2002) *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.